



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAHRUDDIN
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 55937

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.839.855.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 468 m²/145 m² di MAROS, WARISAN Rp. 630.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/90 m² di MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 307.000.000
3. Tanah Seluas 5096 m² di MAROS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 582.935.000
4. Tanah Seluas 240 m² di MAROS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 103.200.000
5. Tanah Seluas 504 m² di MAROS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 216.720.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 157.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 16.690.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.094.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.015.639.000

III. HUTANG

Rp. 20.440.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.995.199.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.